

POLITIK BOURGUIBA TENTANG HUKUM KELUARGA DI TUNISIA (1957-1987)

Ahmad Sukandi

Dosen Non-PNS Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Email: sukandi_ahmad@ymail.com

Abstrak

Konstitusi Tunisia memberikan kekuasaan yang begitu luas kepada Presiden yang jauh melampaui kekuasaan legislatif dan Yudikatif. Presiden tidak dapat di-*makzul*-kan kecuali karena alasan meninggal, mengundurkan diri dan gangguan mental (*incapacity*).

Habib Bourguiba (lahir 3 Oktober 1903 - 6 April 2000) adalah negarawan Tunisia. Beliau merupakan Pengasas dan Presiden pertama Republik Tunisia dari 25 Juli 1957 hingga 7 November 1987. Politik yang dilakukan Bourguiba tentang hukum keluarga ialah pembebasan wanita, pendidikan awam, perancangan keluarga, sistem penjagaan kesehatan, organisasi pen-*tadbir*-an, dan ekonomi. Bourguiba mempromosikan hak-hak wanita sebagai cara mendapatkan sokongan Barat terutama semasa Perang Dingin. Melarang poligami, meluaskan akses wanita kepada perceraian, dan meningkatkan umur kanak-kanak perempuan boleh menikah berusia 17 tahun.

Kata Kunci: Politik, Bourguiba, Hukum Keluarga.

A. Pendahuluan

Tunisia adalah sebuah negara merdeka yang terletak di ujung utara benua Afrika. Tunisia menempati posisi Geopolitik yang sangat strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara bagian Timur dan bagian Barat dunia Arab. Bersama Maroko dan Aljazair, Tunisia membentuk sebuah zona regional yang disebut dengan Arab Maghreb. Ibukota Tunisia adalah Tunis yang tumbuh dari sebuah kota kuno "Carthage" yang berjarak 10 km dari laut Mediterranea.

Habib Bourguiba (lahir 3 Oktober 1903 - 6 April 2000) adalah negarawan Tunisia. Beliau merupakan Pengasas dan Presiden pertama Republik Tunisia dari 25 Juli 1957 hingga 7 November 1987. Beliau sering kali dibandingkan dengan pemimpin Turki, Mustafa Kemal Ataturk karena membawa pembaharuan yang pro-Barat. Pada tahun 1925, Habib Bourguiba bertemu isterinya Mathilde Lorrain di Paris yang sedang menuntut ilmu pada jurusan undang-undang di Sorbonne. Isterinya memeluk agama Islam

dan memilih nama *Moufida Bourguiba*. Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Habib Bourguiba Jr pada bulan April 1927. Kemudian pasangan ini berpisah pada tahun 1961. Beliau menikah lagi dengan Wassila Ben Ammar dan mendapat seorang anak perempuan, Hajer Bourguiba, dan berakhir dengan perceraian pada tahun 1986.

Bourguiba melakukan upaya-upaya konsolidasi kekuasaan dengan dan mengambil langkah-langkah kedepan serta menerapkan peraturan yang tegas. Kebijakan-kebijakannya sangatlah radikal, gamblang mengambil sikap pro-barat dan sekuler. Diantara kebijakannya yang berhubungan dengan dimensi keagamaan adalah menghapus pengadilan agama, menghapus kewajiban memakai jilbab bagi wanita, upaya meninggalkan puasa ramadhan untuk meningkatkan produktifitas dan mengganti hukum syari'ah dengan hukum sipil yang diadopsi dari Perancis. Bahkan pada tahun 1956 rezim ini mengundang hukum status perorangan yang bukan hanya berbeda secara

prinsipil dengan hukum tradisional, tetapi juga dengan hukum Perancis, melalui hukum personal tersebut, Tunisia menjadi negara yang pertama kali melarang poligami.

B. Pembahasan

1. Profil Umum Negara Republik Tunisia

Tunisia adalah sebuah negara merdeka yang terletak di ujung utara benua Afrika. Tipikal geografisnya sangat dipengaruhi oleh kultur Mediterranea dan Gurun Sahara. Luas wilayahnya adalah 63.200 mil persegi atau sekitar 164.000 km² dengan perbatasan laut Mediterranea di sebelah Timur dan Utara, Aljazair di Barat dan Barat Daya serta Libya di Selatan dan Tenggara. Terletak di tengah-tengah Selat Gibraltar dan Terusan Suez serta hanya berjarak 86 mil dari Pulau Sicilia Italia, Tunisia menempati posisi Geopolitik yang sangat strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara bagian Timur dan bagian Barat dunia Arab. Bersama Maroko dan Aljazair, Tunisia membentuk sebuah zona regional yang disebut dengan Arab Maghreb.¹

Ibu kota Tunisia adalah Tunis yang tumbuh dari sebuah kota kuno "Carthage" yang berjarak 10 km dari laut Mediterranea. Kota Carthage dengan pelabuhannya merupakan pusat kebudayaan bersejarah terkemuka di wilayah itu sejak dari abad 9 SM sampai dengan abad 8 M. Hampir semua warga Tunisia adalah Muslim (97%), sedangkan sisanya adalah warga minoritas Yahudi dan komunitas Eropa. Bahasa nasional adalah bahasa Arab dengan dialek yang nyaris seragam. Sedangkan bahasa Perancis berkedudukan sebagai bahasa resmi kedua. Tetapi, sangat minim warga yang nyaman dengan bahasa Perancis. Kefasihan berbahasa Perancis menjadi simbol status sosial dan menjadi pintu bagi warga Tunisia untuk melakukan kontak internasional..²

¹ Benjamin Rivlin, "Tunisia", in The Encyclopedia Americana: international Edition Volume 27, (New York: Americana Corporation, 1972), h. 222

²Hafedh Sethom, "Tunisia: demography and

2. Sejarah Bangsa

Data-data arkeologis menunjukkan bahwa wilayah Tunisia telah didiami manusia setidaknya sejak 200.000 tahun yang lalu. Beberapa alat bantu manusia primitif ditemukan di banyak oasis sekitar Kelibiya di daerah pedalaman.³Tetapi hampir semua referensi sepakat bahwa sejarah peradaban di Tunisia dimulai dengan datang dan menetapnya suku Phoenix (Punic) di daerah tersebut sejak sekitar 1100 tahun sebelum masehi. Kota yang pertama didirikan oleh suku Phoenix ini bernama Utica yang terletak antara Tunis dan Bizerte, dan terus mengembangkan wilayah dengan mendirikan banyak pemukiman lain di sekitar daerah pesisir. Diantara beberapa pemukiman baru tersebut, yang paling terkenal adalah Carthage. Wilayah kekuasaan Carthage inilah yang kemudian menjadi akar entitas kultural Tunisia sebagai sebuah kesatuan.⁴

Setelah beberapa peperangan besar, Carthage akhirnya jatuh ke tangan Romawi pada tahun 146 SM. Kestrategisan Carthage mendorong Romawi untuk tetap menjadikan kota tersebut sebagai pusat pemerintahan dan pengembangan kebudayaan mereka di Afrika. Di bawah Romawi, wilayah Tunisia berkembang menjadi daerah yang makmur.⁵ Masuknya pasukan Arab ke wilayah Carthage telah dimulai sejak tahun 648 M, tetapi sifatnya masih berbentuk serbuan-serbuan kecil (raids, razzias). Penyerangan dalam skala besar dengan maksud pendudukan dipelopori oleh Uqbah Ibn Nafi dua dekade kemudian dan berhasil

Economy", in P.J Bearman (et.al),(eds.), TheEncyclopaedia of Islam New Edition, volume X,(Leiden: E.J. Brill, 2000), h. 642

³Tunisia Country Guide, h. 25

⁴Benjamin Rivlin, "Tunisia", inThe Encyclopedia Americana: international Edition Volume 27,(New York: Americana Corporation, 1972)",h. 222

⁵Benjamin Rivlin, "Tunisia", h. 222g, lihat juga Nicholas S. Hopkins, "Tunisia", in Melvin Ember and Carol R. Ember, Countries and Their Cultures Volume 4, (New York: Macmillan Reference USA, 2001), h. 224

menyingkirkan pengaruh Bizantium dari wilayah itu. Tahun 670 M Uqbah mendirikan sebuah kota yang dinamakan Kairouan dan menjadi Ibukota pertama pemerintahan Islam di wilayah Maghreb. Sampai akhir abad ke-7, stabilitas pemerintahan Arab-Islam di Carthage terus mendapatkan perlawanan lokal.⁶

Tahun 1228, gubernur Tunis yang ditetapkan oleh dinasti Almohade (Muwahhidun) memisahkan diri dan membentuk sebuah kerajaan baru, Dinasti Hafsid. Dinasti ini berhasil eksis selama lebih dari 300 tahun. Di bawah pemerintahan dinasti Hafsid inilah Tunisia mencapai puncak kejayaannya. Pusat-pusat peradaban tumbuh subur dan berhasil mengembangkan literatur, seni dan ilmu pengetahuan Islam di tengah-tengah kehidupan urban yang didominasi masyarakat borjuis. Universitas Zaituna didirikan pada masa keemasan ini, dan secara umum Dinasti Hafsid telah berhasil membangun pilar identitas distinktif masyarakat Tunisia yang inklusif.⁷

Perjuangan menuju pembentukan negara Tunisia modern mulai digagas sejak awal abad 20. Tak puas oleh diskriminasi pemerintahan protektorat dan kekhawatiran tergerusnya tradisi Arab-Islam di Tunisia, sebuah delegasi yang mewakili elemen masyarakat yang diketuai oleh Syekh Abd al-Aziz Taalbi mempresentasikan sebuah petisi di depan Paris *Peace Conference* pada tahun 1919 dan menuntut penentuan nasib sendiri (*self-determination*) oleh bangsa Tunisia. Petisi ini jelas ditolak mentah-mentah oleh Perancis, tetapi menjadi basis bagi berdirinya partai Destour. Dua dekade kemudian partai ini semakin mempunyai akar-rumput yang menguat, dan karena perkembangan perbedaan visi misi berevolusi menjadi dua partai. Taalbi tetap memimpin partainya yang selanjutnya disebut Old Destour.

⁶ Mounira Chapoutot-Remadi and Radhi Daghfous, "*Tunisia: The Islamic Period up to ca. 1500*", in P.J Bearman (et.al),(eds.), *The Encyclopaedia of Islam New Edition*, volume X,(Leiden: E.J. Brill, 2000), h. 644-645

⁷ Benjamin Rivlin, "*Tunisia*", h. 222

Tokoh baru dengan platform baru juga muncul memimpin partai baru Neo Destour. Dia adalah Habib Bourguiba.⁸

Berkarier sebagai pengacara provinsi yang flamboyant, Habib Bourguiba menjelma menjadi pemimpin yang lantang menyuarakan anti-kolonialisme di Afrika Utara. Karena aksi-aksinya, pemerintah Perancis terus membungkam gerakan Bourguiba dan kawan-kawan dari partai Neo Destour dengan upaya represif dan pemenjaraan. Bourguiba sendiri pernah ditahan selama hampir 11 tahun sebelum akhirnya dibebaskan oleh pemerintah pendudukan Nazi Jerman pada tahun 1940-an.

Perang Dunia II memang menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan kemerdekaan Tunisia. Tokoh-tokoh pergerakan Tunisia yang sebelumnya ditahan oleh pemerintahan protektorat Perancis dibebaskan oleh aliansi axis Jerman dan Italia yang menguasai Tunisia dari 1940-1943. Saat koalisia pimpinan AS mengusir aliansi axis dari wilayah itu dan mengembalikan kekuasaan ke tangan Perancis. Nasionalisme di Tunisia di bawah pimpinan Bourguiba telah semakin menguat. Kondisi tersebut membuat Perancis mereformulasi kebijakannya secara lebih terbuka dan semakin sensitif terhadap tuntutan rakyat Tunisia. Posisi perdana menteri yang dipegang Bourguiba kemudian berubah menjadi Presiden seiring dengan penghapusan sistem monarki dan Tunisia menjadi Negara Republik pada tanggal 25 Juli 1957. Undang-undang Dasar Tunisia pun akhirnya terbentuk dan secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juni 1959.⁹

Pemerintahan Bourguiba banyak melakukan perubahan ke arah kemajuan yang cenderung bersifat modernisasi dan westernisasi. Reformasi sosial terutama

⁸ Benjamin Rivlin, "*Tunisia*",h. 222

⁹ Ali Mahjoubi, "*Tunisia: The Period of Protectorate and the Establishment of Independent Tunisia*", in P.J Bearman (et.al),(eds.), *The Encyclopaedia of Islam New Edition*, volume X,(Leiden: E.J. Brill, 2000), h. 653.

difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, partisipasi wanita dan perbaikan ekonomi. Pada tahun 1960-an, pemerintah mempraktekkan sistem kebijakan sosialis, tetapi kemudian kembali ke pola liberalism dengan mempertahankan keterlibatan negara pada beberapa sektor substansial ekonomi. Tahun 1987, Bourguiba dilengserkan dari kursi kepresidenan atas alasan kesehatan dan digantikan oleh Zine El Abidine Ben Ali. Pola pemerintahan Ben Ali meneruskan sistem otoriter yang sebelumnya dipraktekkan oleh Bourguiba. Kebijakan-kebijakan kontemporer lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis, bukan ideologis.¹⁰

Bourguiba melakukan upaya-upaya konsolidasi kekuasaan dengan dan mengambil langkah-langkah kedepan serta menerapkan polisi yang tegas. Kebijakan-kebijakannya sangatlah radikal, gamblang mengambil sikap pro barat dan sekuler. Diantara kebijakannya yang berhubungan dengan dimensi keagamaan adalah menghapus pengadilan agama, menghapus kewajiban memakai jilbab bagi wanita, upaya meninggalkan puasa ramadhan untuk meningkatkan produktifitas dan mengganti hukum syari'ah dengan hukum sipil yang diadopsi dari Perancis. Bahkan pada tahun 1956 rezim ini mengundang hukum status perorangan yang bukan hanya berbeda secara prinsipil dengan hukum tradisional, tetapi juga dengan hukum Perancis. Jadilah, melalui hukum personal tersebut, Tunisia menjadi negara yang pertama kali melarang poligami.¹¹

3. Sistem Politik dan Pemerintahan

Bentuk negara serta pola struktur kekuasaan politik dan pemerintahan di Tunisia tercermin dengan jelas dalam konstitusinya yang pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 Juni 1959.

¹⁰ Nicholas S. Hopkins, "Tunisia", h. 2250

¹¹ Ira M. Lapidus. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 235. Juga John Ober Voll. 1982. *Islam: Continuity and Change in the Modern World*. England: Westview Press. h. 235-237.

Pada perkembangan selanjutnya, Konstitusi yang berisi 10 Bab dan 74 Pasal ini telah mengalami beberapa proses amandemen yang kesemuanya terjadi pasca lengsernya Bourguiba dari kursi kepresidenan.¹² Amandemen pertama disahkan tanggal 12 Juli 1988, selanjutnya berturut-turut tanggal 29 Juni 1999, tanggal 1 Juni 2002, tanggal 13 Mei 2003 dan tanggal 28 Juli 2008.¹³

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara tercantum secara eksplisit dalam teks pembukaan konstitusi (Preamble). Konsep Liberte, Egalit dan Fraternite terangkum dalam faham kemanusiaan, keadilan, persatuan, persaudaraan Arab Maghreb, serta pemisahan kekuasaan. Islam juga menjadi salah satu pilar negara dalam posisi yang sejajar dengan pilar-pilar lain yang disebutkan di atas.

Sebelum tahun 2002, badan legislatif Tunisia menganut sistem Uni-kameral, dimana 214 kursi anggota parlemen hanya diduduki oleh perwakilan dari partai politik yang ikut serta dalam Pemilu. Pada periode ini,¹⁴ jumlah kursi parlemen ditentukan oleh perolehan suara masing-masing partai. Namun, karena pada hampir setiap pemilu partai pemerintah selalu mendulang angka di atas 95%, pada tahun 1999 sebuah amandemen dikeluarkan untuk memberikan ruang bagi suara oposisi di parlemen. Setiap partai politik yang memenangkan pemilu memborong 75% (161) kursi parlemen. Sedangkan 25% (53) kursi sisa dibagikan kepada partai-partai peserta pemilu lainnya

¹² Teks konstitusi Tunisia dapat diakses secara online di beberapa situs, diantaranya <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan004842.pdf>

¹³ Untuk informasi seputar detail amandemen Konstitusi Tunisia bisa dilihat di situs resmi pemerintah Tunisia yang khusus menginformasikan isu-isu seputar konstitusi di http://www.chambre-dep.tn/a_constit.html. Situs ini masih dapat di akses pada awal Juni 2011

¹⁴ Meskipun bersifat formalitas, Multipartyism di Tunisia baru dikemalkan pada tahun 1981 dimana saat itu Presiden Bourguiba memutuskan untuk membentuk partai oposisi di parlemen. Lihat misalnya, US Department of State, "Background Note: Tunisia", released on October 11, 2010, at <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5439.htm>

berdasarkan asas proporsionalitas. Barulah pada tahun 2002, amandemen konstitusi merubah wajah parlemen Tunisia menjadi bicameral. Selain anggota hasil pemilu, parlemen juga diduduki oleh “Dewan Penasehat” (*Chamber of Advisory, Majlis al-Shura*) yang berjumlah 126 orang dengan rincian 85 merupakan utusan daerah atau golongan serta 41 orang yang ditunjuk Presiden. Dewan Penasehat menjabat selama 6 tahun dengan pergantian setengah dari anggotanya dalam kurun waktu 3 tahun.¹⁵

Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden yang bertanggungjawab dalam semua penyelenggaraan pemerintahan dan penetapan dasar-dasar fundamental pembangunan. Presiden juga berperan sebagai kepala negara sebagaimana tercermin dalam fungsi diplomatik dan posisinya sebagai pimpinan tertinggi militer.¹⁶

Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh kabinet atau dewan menteri (*Council of Ministers*) yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Penentuan personil yang menduduki jabatan-jabatan menteri tersebut adalah hak prerogatif Presiden. Presiden juga memiliki kekuasaan dalam menetapkan pejabat tinggi dalam jabatan sipil seperti gubernur dan walikota serta dalam jabatan militer.¹⁷

Seperti disebutkan di atas, Konstitusi Tunisia memberikan kekuasaan yang begitu luas kepada Presiden yang jauh melampaui kekuasaan legislatif dan Judikatif. Presiden tidak dapat di-*makzulkan* kecuali karena

alasan meninggal, mengundurkan diri dan gangguan mental (*incapacity*). Tetapi sebaliknya, Presiden mempunyai hak untuk membubarkan parlemen, menentukan orang yang duduk di *Majlis al-Shura*, dan membongkar pasang personal yang memimpin lembaga Judikatif.¹⁸ Kekuasaan Judikatif dipimpin oleh sebuah lembaga mirip Mahkamah Agung yang bernama *Superior Council of Magistrature* yang diduduki oleh hakim-hakim agung. Fungsi kehakiman di Tunisia menjalankan dua jenis peradilan, umum (*Court of Accounts*) dan Administratif (*Administrative Tribunal*), dan terdiri dari tiga level tingkatan berupa *District Court, Court of Appeal dan Highest Court (Cour de Cassation)*.¹⁹ Di atas kertas, kekuasaan judikatif ini berdiri secara independen. Tetapi karena status hakim-hakim yang dilantik dan diberhentikan oleh pemerintah, independensi mereka sangat rentan terhadap petunjuk pemerintah terutama dalam kasus-kasus politik yang sensitif.²⁰

4. Demokrasi Di Tunisia

John O. Voll menyebutkan bahwa tipe rejim pemerintahan Tunisia adalah *Liberal secularist Authoritarian*. Ia mengakui bahwa rangkaian istilah kata tersebut terkesan kontradiktif dimana liberalism yang menjadi dasar demokratisasi menjelma menjadi sebuah gaya yang otoriter.²¹ Memang, di atas kertas, pengembangan demokrasi di Tunisia menawarkan basis potensi yang menjanjikan dan situasi politik yang mendukung. Mengantongi predikat sebagai negara paling “terbuka” di Timur

¹⁵ US Department of State, “Background Note: Tunisia”.

¹⁶ Article 55 Tunisia Constitution.

¹⁷ Terdapat beberapa fase krusial dalam penetapan masa keberturutan jabatan Presiden. Tahun 1974, Bourguiba ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Tahun 1988, Konstitusi membatasi bahwa Presiden terpilih boleh mencalonkan diri secara berturut-turut dalam dua pemilihan umum berikutnya. Referendum tahun 2002 kemudian menyepakati bahwa Presiden Ben Ali diperbolehkan mengikuti pemilu presiden sampai lima kali berturut-turut. Lihat misalnya US Department of State, “Background Note: Tunisia”.

¹⁸ Article 28 & 27 Tunisia Constitution.

¹⁹ Jika dianalogikan ke dalam konteks Indonesia bentuk pengadilan ini mirip seperti jengjang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Poin-poin mengenai kehakiman di Tunisia terdapat dalam article 64-69 Tunisia Constitution.

²⁰ US Department of State, “Background Note: Tunisia”

²¹ John O. Voll, “Sultans, Saints and Presidents: The Islamic Community and the State in North Africa”, dalam John P. Entelis, (ed.), *Islam, Democracy, and the State in North Africa*, (Indiana: Indiana University Press, 1997), h. 1-16

Tengah dengan gaya pemerintahan yang pro-Barat adalah modal utama bagi penguatan demokratisasi. Teks-teks eksplisit Konstitusi juga menyebutkan bahwa demokrasi dengan prinsip pembagian kekuasaan, kemerdekaan untuk berserikat serta beraspirasi dijamin oleh negara. Syarat-syarat lain yang menjadi indikasi dari sebuah negara demokratis juga hampir dimiliki secara lengkap oleh Tunisia. Multipartisme tampak berjalan dengan baik di permukaan. Meski selama 25 tahun pertama pasca kemerdekaan Tunisia hanya memiliki satu partai resmi yaitu *Socialist Destour* pimpinan Bourguiba, tahun 1981 pemerintah mengesahkan dua partai oposisi, Jika dianalogikan ke dalam konteks Indonesia bentuk pengadilan ini mirip seperti jenjang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Jatah kursi di parlemen bagi oposisi pun meningkat dari hanya 5% pada tahun 1994 hingga mencapai 25% pada pemilu terakhir tahun 2009. Penambahan kursi oposisi ini bukan karena hasil perolehan suara pemilu oposisi yang meningkat, tetapi lebih karena kebijakan belas kasihan Ben Ali untuk menunjukkan demokratisasi di negeri yang dipimpinnya.²²

Tanda-tanda kehidupan dari *civil society* di Tunisia pun juga tampak dari banyaknya organisasi non-pemerintah. Organisasi yang paling dominan dan telah berbicara banyak dalam panggung sejarah negara adalah serikat pekerja UGTT. Selain berjasa dalam mengantar kemerdekaan, serikat pekerja ini menjadi kekuatan kontrol yang telah berfungsi efektif sebagai oposisi pemerintah dari luar sistem.²³Selain UGTT,

²² Partai-partai itu adalah At-Tajdid Movement (Ahmed Brahim); Democratic Forum for Labor and Liberties or FDTL (Mustapha Ben Jaafar); Liberal Social Party or PSL (Mondher Thabet); Movement of Democratic Socialists or MDS (Ismail Boulahia); Popular Unity Party or PUP (Mohamed Bouchiha); Unionist Democratic Union or UDU (Ahmed Inoubli); Progressive Democratic Party or PDP (Maya Jribi); Green Party for Progress or PVP (Mongi Khamassi).

²³ Ulasan mendalam mengenai peran sentral dari serikat pekerja ini berikut pasang surut kekuatan politik yang dimilikinya dapat dilihat di Stephen J.

organisasi pelajar atau mahasiswa yang kini bernama *General Union of Tunisian Students* juga pernah pamer kekuatan sebagai social-control terhadap pemerintah terutama pada masa Bourguiba. Ribuan organisasi lain yang berupa organisasi profesi dan keolahragaan juga diakui keberadaannya. Meski pemerintah memang sangat ketat dalam mengeluarkan perizinan bagi oraganisasi baru, banyak organisasi illegal yang bermunculan. Organisasi-organisasi ini umumnya bergerak dalam bidang advokasi dan pengupayaan ke penguatan demokrasi.²⁴

Pemberdayaan wanita dan pengakuan terhadap hak asasi manusia juga mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Peningkatan status sosial wanita memang telah menjadi platform utama pembangunan sejak masa kemerdekaan. Jumlah wanita yang bekerja di institusi resmi negara hampir sebanding dengan jumlah pria, sementara lebih dari 11% wanita duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Pemerintah juga memberikan kesempatan yang luas bagi wanita untuk membentuk wadah perkumpulan sehingga terbentuklah organisasi seperti *Tunisian Association of Democratic Women* (ATFD) dan *The Association of Tunisian Women for Research and Development*. Sementara dalam bidang HAM, tahun 1987 Tunisia meratifikasi hukum internasional. Gebrakan ini dimulai pada masa awal pemerintahan Ben Ali. Meskipun dicurigai sebagai maneuver membentuk citra dan mendongkrak popularitas, Ben Ali membentuk lembaga HAM pertama di Tunisia, *The Tunisian Human Rights League* (LTDH), dan melakukan perubahan besar dalam reformasi HAM dengan mengeluarkan tahanan-tahanan politik dan merevisi UU subversi mengenai mekanisme penangkapan dan penahanan.

King, *Liberalization Against Democracy: The Local Politics of Economic Reform in Tunisia*,(Indiana: Indiana University Press, 2003)

²⁴ US Department of State, "Background Note: Tunisia".

Lembaga LTDH terus berfungsi hingga saat ini.²⁵

Komitmen pemerintah Tunisia dalam penguatan demokratisasi hanya tertuang di atas kertas dan tampak dipermukaan saja. Di lapangan, masyarakat justru tidak menikmati kebebasan berpolitik. Pemerintah sangat ketat membatasi kebebasan berkumpul, berserikat dan beraspirasi melalui kegiatan pengawasan, mata-mata, dan penangkapan di luar prosedur hingga penyiksaan. Melalui kekuasaannya, presiden bisa mendikte lembaga-lembaga tinggi lain dengan membongkar pasang individu yang dikehendakinya. Kekuatan *civil society* pun diperlemah dan dipecahbelah melalui serangkaian kebijakan ketat atas nama “Persatuan Nasional” dan “Ketertiban Umum” sehingga negara dengan mudah mengkooptasi lembaga-lembaga yang berpotensi vokal. Pemerintah juga melakukan kontrol yang ketat terhadap kebebasan pers.²⁶

5. Demokrasi di Bawah Pemerintahan Habib Bourguiba

a. Riwayat Hidup Habib Bourguiba

Habib Bourguiba dilahirkan pada 3 Oktober 1903 di Monastir, 100 batu di selatan Tunis. Bourguiba bersekolah di Sadiki College, Tunis dan kemudian di Carnot Lycee. Pada 1924, beliau melanjutkan pelajaran dalam jurusan undang-undang dan sains politik di Universiti Paris. Semasa di Paris, Bourguiba bertemu dengan Mathilde Lorrain dan menikah pada 1927. Mereka mendapat seorang anak yakni Habib Bourguiba Jr pada 9 April 1927.

Habib Bourguiba (lahir 3 Oktober 1903 - 6 April 2000) adalah negarawan Tunisia. Beliau merupakan Pengasas dan Presiden pertama Republik Tunisia dari 25 Julai 1957 hingga 7 November 1987. Beliau sering kali dibandingkan dengan pemimpin Turki,

²⁵ Susan Waltz, “The Politics of Human Rights in Maghreb”, dalam John P. Entelis, (ed.), *Islam, Democracy, and the State in North Africa*, (Indiana: Indiana University Press, 1997), hal. 75-91

²⁶ US Department of State, “Background Note: Tunisia”.

Mustafa Kemal Atatürk karena membawa pembaharuan yang pro-Barat. Ia belajar hukum di Universitas Paris. Ia menjadi anggota Partai Destour (Konstitusi) yang netral pada 1921. Ia menginginkan aksi politik yang lebih tegas, sehingga membentuk Partai Neo-Destour pada 1934 untuk kemerdekaan Tunisia. Partai ini dilarang pemerintah kolonial Perancis karena memimpin perlawanan rakyat terutama buruh untuk mogok dan unjuk rasa. Karena kegiatan politiknya, Bourguiba dipenjarakan di Perancis (1934-1936 dan 1938-1943), namun melarikan diri ke Timur Tengah (1945-1949) dan berkeliling dunia (1951) untuk memperjuangkan kemerdekaan Tunisia. Pada Februari 1952 ia dan pemimpin Neo-Destour lainnya ditangkap sehingga menimbulkan unjuk rasa dan kerusuhan di seluruh pelosok Tunisia. Pada 27 Februari 1956, ia memimpin delegasi Tunisia untuk perundingan kemerdekaan di Paris, dan sebulan kemudian Perancis secara resmi mengakui kemerdekaan Tunisia.

Pada tahun 1925, Habib Bourguiba bertemu isterinya Mathilde Lorrain di Paris yang sedang menuntut ilmu pada jurusan undang-undang di Sorbonne. Isterinya memeluk agama Islam dan memilih nama *Moufida Bourguiba*. Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Habib Bourguiba Jr pada bulan April 1927. Kemudian pasangan ini berpisah pada tahun 1961. Beliau menikah lagi dengan Wassila Ben Ammar dan mendapat seorang anak perempuan, Hajer Bourguiba, dan berakhir dengan perceraian pada tahun 1986. Bourguiba diangkat sebagai presiden pada 1957 setelah tergulingnya Bey Muhammad al-Amin, Raja Tunisia. Melihat pada paham moderat, ia memperjuangkan sekularisme dan hak wanita. Bourguiba meninggal dunia pada 6 April 2000 pada usia 96 tahun. Beliau dikebumikan dengan penuh penghormatan negara pada 8 April 2000 di Makam Monastir.

Antara pembaharuan kerajaan Bourguiba ialah pembebasan wanita, pendidikan awam, perancangan keluarga, sistem penjagaan kesehatan, organisasi

pentadbiran, kewangan dan ekonomi. Wakaf disekat kerana dianggap sebagai harta beku. Beliau berusaha membina infrastruktur negara. Bourguiba mempromosikan hak-hak wanita sebagai cara mendapatkan sokongan Barat terutama semasa Perang Dingin. Undang-undang melarang poligami, meluaskan akses wanita kepada perceraian, dan meningkatkan umur kanak-kanak perempuan boleh menikah berusia 17 tahun. Tetapi beliau mengharamkan kumpulan hak asasi wanita.

Akibat terpengaruh pemikiran Barat, Habib Bourguiba selalu menghina Islam. Secara eksplisit ia menentang pemahaman dan ketentuan syariat. Ketentuan syariat yang sudah jelas dilarang dan dihina. Saat berpidato di depan mahasiswa jurnalistik mengenai sejarah perjuangan Rasulullah SAW, secara vulgar ia menyerang ajaran Islam. Ia menyatakan Al-Qur'an mengandung sekian kekeliruan yang tak bisa lagi diterima akal rasional. Nabi Muhammad SAW dianggapnya sebagai manusia yang kebanyakan mengembara dan mendengar hikayat, dongeng, dan legenda murahan saat itu. Ia pun menyatakan, secara sengaja ke dalam Al-Qur'an ditambahkan kisah Nabi Musa AS. Tambahan pula, menurutnya umat terlalu mendewa-dewakan Nabi Muhammad dengan berulang-ulang mengiringi sebutan Rasulullah dengan *shollallohu 'alaihi was salam*. Sejak ia menerima tampuk kekuasaan, ia menyusun makar untuk menghancurkan Islam berikut institusi pengusung, nilai, ulama dan aktivisnya. Ia menutup Universitas az-Zaytunah, universitas tertua di Afrika, padahal universitas ini menjadi pusat pendidikan Islam di Afrika dan Eropa meski saat Perancis menjajah Tunisia. Salah satu tujuan makar Habib Bourguiba ialah membaratkan Tunisia, sehingga bahasa Arab diganti bahasa Perancis sebagai bahasa pergaulan masyarakat maupun bangsawan. Mahkamah Syari'at diganti dengan Mahkamah Sipil yang peraturan Undang-Undangnya mengadopsi sepenuhnya UU Barat.

Dalam usahanya melemahkan institusi Islam, Bourguiba merencanakan UU yang bertujuan merampas harta wakaf di seluruh Tunisia, padahal harta wakaf merupakan 33% kekayaan Tunisia. Sekolah dan madrasah yang mengajarkan Al-Qur'an ditutup. UU lain dikeluarkan demi melegalkan praktik mesum selama disetujui kedua belah pihak. Kampanye anti Islam mencapai puncaknya saat pada Maret 1974 Habib Bourguiba menyeru rakyatnya agar meninggalkan kewajiban berpuasa. Menurutnya syariat berpuasa dianggap sebagai batu penghalang pertumbuhan ekonomi. Ribuan wanita Islam disingkirkan dari pegawai pemerintahan dan pusat pendidikan. Banyak yang dilarang berhijab dalam kehidupan umum seperti rumah sakit dan jalan raya. Meski dilarang UU dan dipersempit aparat keamanan, para pemakai jilbab di Tunisia tetap semakin banyak jumlahnya. Pemakaian jilbab di sana dilarang menurut UU No.108 tahun 1981. Isinya menegaskan bahwa jilbab ialah busana etnis/kelompok yang bukan kewajiban agama. Sehingga dalam UU itu ditulis larangan berjilbab di sekolah dan perguruan tinggi.

Sejak kemerdekaan, pemerintahan Bourguiba memfokuskan kebijakannya pada stabilitas negara dengan memperkuat pilar-pilar struktur, infra struktur, serta supra strukturnya. Institusi kenegaraan terus dibenahi dan pada saat yang sama terus menggenjot pembangunan perekonomian. Masalah baru timbul ketika krisis ekonomi mulai melanda kepemimpinan Bourguiba. Beberapa kebijakan terpimpin Bourguiba di tahun 60-an dan awal tahun 70-an yang cenderung sosialis dengan menerapkan nasionalisasi perusahaan dan pembangunan perekonomian kooperatif mengakibatkan boykot besar-besaran dari negara-negara asing yang sebelumnya menjadi donor utama pembangunan negara. Tuntutan-tuntutan rakyat yang awalnya bermotif ekonomi inilah kemudian yang mendorong

lahirnya seruan-seruan ke arah demokratisasi.²⁷

Unjuk rasa rutin yang diprakarsai UGTT mendapatkan respon yang luas dari masyarakat sehingga mengundang organisasi-organisasi lain untuk bergabung secara sukarela. Gelombang protes yang semakin intens di akhir 70-an tersebut menyulitkan posisi pemerintahan Bourguiba yang terus mempertahankan polaauthoritarian-populist nya.²⁸Akhir tahun 70-an dan awal 80-an, pemerintahan Bourguiba mendapat serangan kritik tajam dari setidaknya empat elemen kekuatan masyarakat. Kelompok Muslim juga menjadi elemen penting dalam gerakan anti pemerintahan Bourguiba. Awalnya, isu yang diangkat kelompok Muslim adalah kritik terhadap kebijakan yang dipandang anti-Islam. Setelah 1978, kritik kelompok ini semakin komprehensif dengan melibatkan argumen sosio-politik dan religius dalam menggalang massa untuk menghantam pemerintah yang dianggap diktator, antek kekuatan asing dan penindas.²⁹

Beberapa lingkaran orang dalam Borguiba yang tersingkirkan akhirnya ikut menyuarakan suara oposisi dan membentuk partai. Ahmed Ben Salah yang dipecat Bourguiba akhirnya mendirikan partai Komunis (MUP) dan Ahmad Mestiri membentuk Partai Sosialis Demokrat (MDS). Banyak tokoh pimpinan dari elemen kekuatan masyarakat ditangkap dan lari ke luar negeri. Wajah pemerintahan Bourguiba yang tadinya kharismatik dan populis berubah merosot menjadi uauthoritarianis, sentralistik dan korup. Elemen kekuatan masyarakat memang tampak diakomodir, tetapi Bourguiba hanya merangkul representasi dari pihak elit rejim

²⁷ Stephen J. King, *Liberalization against Democracy*, h. 27-28.

²⁸Chris Alexander, "State, Labor, and the New Global Economy in Tunisia." In Dirk J. Vandewalle (ed.), *North Africa: Development and Reform in a Changing Global Economy*, (New York: St. Martin's Press, 1996), h. 182-183

²⁹Mohamed Elhachmi Hamdi, *The Politicisation of Islam: A Case Study of Tunisia*. (Boulder, Colo.: Westview, 1998), h. 32

yang minoritas saja dengan mengakui secara resmi berdirinya dua oposisi partai baru. Sementara kekuatan serikat pekerja UGTT dan mahasiswa terus dikekang, bahkan kelompok Muslim benar-benar ditekan melalui pelarangan organisasi. Atmosfir politik tersebut terus bertahan hingga akhirnya kekuasaan Bourguiba berakhir melalui sebuah Kudeta tak berdarah yang menaikkan Ben Ali ke kursi kepresidenan.

b. Reformasi Hukum Keluarga Tunisia

Tunisia melakukan reformasi dan kodifikasi hukum keluarga pada saat setelah negara itu memperoleh kemerdekaan. Pada akhir tahun empat puluhan, beberapa ahli hukum terkemuka Tunisia berpikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, maka sebuah ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial di Tunisia. Sekelompok ahli hukum mengajukan catatan perbandingan antara dua sistem hukum, Hanafi dan Maliki, dan dipublikasikan dibawah judul *Lihat Majallatal-Ahkamal-Syar'iyah* (Draf Undang-undang Hukum Islam).

Berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari Lihai dan Undang- undang Hukum Keluarga Mesir, Jordan, Syria dan Turki, panitia mengajukan Rancangan Undang-undang Hukum Keluarga kepada pemerintah. Rancangan tersebut akhirnya diundangkan dibawah judul *Majallatal-Ahwalal-Syakhsiyah (Code of Personal Status)* 1956, berisi 170 pasal 10 buku dan diundangkan keseluruh Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957. Namun dalam perjalanannya, Undang-undang ini mengalami kodifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali, yaitu melalui Undang-undang No.70/1958, Undang-undang No.41/1962, Undang-undang No.1964, Undng-undang No.77/1969, dan terakhir menurut catatan Tahir Mahmud, mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui Undang-undang No. 1/1981.³⁰Perlu

³⁰Tahir Mahmood. 1987. *Personal Law in*

dicatat, bahwa walaupun secara umum berlandaskan mazhab Maliki, akan tetapi Undang-undang ini memasukkan pula beberapa prinsip yang berasal dari mazhab-mazhab yang lain. Jika dibanding dengan negara-negara Arablain, reformasi dibidang hukum di Tunisia lebih revolusioner. Adapun Substansi-substansi Hukum Keluarga di Tunisia adalah aturan mengenai nafkah isteri, larangan poligami, perceraian dan talak tiga.³¹

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Politik yang dilakukan Bourguiba tentang hukum keluarga ialah pembebasan wanita, pendidikan awam, perancangan keluarga, sistem penjagaan kesehatan, organisasi pen-*tadbir*-an, dan ekonomi. Bourguiba mempromosikan hak-hak wanita sebagai cara mendapatkan sokongan Barat terutama semasa Perang Dingin. Dengan Rancangan Undang-undang Hukum Keluarga yang diundangkan dengan judul *Majallatal-Ahwalal-Syakhsyah (Code of Personal Status)* 1956, berisi 170 pasal 10 buku dan diundangkan keseluruh Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957, yang melarang poligami, meluaskan akses wanita kepada perceraian, dan meningkatkan umur kanak-kanak perempuan boleh menikah berusia 17 tahun.
2. Tunisia melakukan reformasi dan kodifikasi hukum keluarga pada saat setelah negara itu memperoleh kemerdekaan. Sekelompok ahli hukum melakukan perbandingan antara dua sistem hukum, Hanafi dan Maliki, dan dipublikasikan dengan judul *Majallatal-Ahkamal-Syar'iyah (Draf Undang-undang Hukum Islam)* 1956. Pemerintah membentuk sebuah komite dibawah pengawasan Syeikh Islam, Muhammad

al-Jait, guna merancang Undang-undang resmi yang berisi 170 pasal 10 buku dan diundangkan keseluruh Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957. Namun dalam perjalanannya, Undang-undang ini mengalami kodifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali, yaitu melalui Undang-undang No.70/1958, Undang-undang No.41/1962, Undang-undang No.1964, Undng-undang No.77/1969, dan terakhir menurut catatan Tahir Mahmud, mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui Undang-undang No. 1/1981.

D. Daftar Pustaka

- Abouzeid, Rania, "Bouazizi: The Man Who Set Himself and Tunisia on Fire", *TIME*, Jan. 21, 2011
- Alexander, Chris, "State, Labor, and the New Global Economy in Tunisia." In Dirk J.Vandewalle (ed.), *North Africa: Development and Reform in a Changing Global Economy*, (New York: St. Martin Press, 1996).
- BBC, "Habib Bourguiba: Father of Tunisia", BBC News, 6 April 2000 at <http://news.bbc.co.uk/2/hi/obituaries/703907.sm>
- BBC, "Tunisia Suicide Protester Mohammed Bouazizi Dies", BBC News, 4 January 2011.
- Brunschvig, R., "Tunisia: Religious Life", in P.J Bearman (et.al),(eds.), *The Encyclopaedia of Islam New Edition*, volume X, (Leiden: E.J. Brill, 2000).
- (Leiden: E.J. Brill, 2000) Daoud, Arezki, "Opposition Parties in Tunisia at the Eve of the Elections." *North Africa Journal*, no. 66, September 30, 1999. At <http://www.north-africa.com/archives/docs/093099A.htm>. Editors, "Tunisia: Bourguiba and

Islamic Countries. New Delhi: Academy of Law and Religion, h.152-154.

³¹*Ibid.*, h. 102

- After”, in P.J Bearman (et.al),(eds.),
The Encyclopaedia of islam New
Edition, volume X,(Leiden: E.J.
Brill, 2000).
- Entelis,John P., “Political Islam in The
Maghreb: Non-Violent Dimension”,
dalam John P. Entelis, (ed.), Islam,
Democracy, and the State in North
Africa,(Indiana: Indiana University
Press, 1997).
- Hopkins, Nicholas S., “Tunisia”,in Melvin
Ember and Carol R.
Ember,Countries and Their Cultures
Volume 4,(New York: Macmillan
Reference USA, 2001).
- King, Stephen J.,Liberalization Against
Democracy: The Local Politics of
Economic Reform in
Tunisia,(Indiana: Indiana University
Press, 2003)
- Mahjoubi, Ali, “Tunisia: The Period of
Protectorate and the Establishment of
Independent Tunisia”,in P.J
Bearman (et.al),(eds.), The
Encyclopaedia of islam New
Edition, volume X,(Leiden: E.J.
Brill, 2000).
- Mahjoubi, Ammar, “Tunisia: History. The Pre-
Islamic Period”,in P.J Bearman
(et.al),(eds.), The Encyclopaedia of
islam New Edition, volume X,
(Leiden: E.J. Brill, 2000).
- Rivlin, Benjamin, “Tunisia”,inThe
Encyclopedia Americana: international
Edition Volume27, (New York:
Americana Corporation, 1972).
- Sethom, Hafedh, “Tunisia: demography and
Economy”,in P.J Bearman (et.al),
(eds.), The Encyclopaedia of islam
New Edition, volume X,(Leiden: E.J.
Brill, 2000).